

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan aliansi negara-negara Eropa dan Amerika Utara yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Washington dengan tujuan utama melindungi kebebasan dan keamanan sekutu melalui cara politik dan militer (NATO, 2022b). Sejak pembentukannya, AS memainkan peran yang dominan dalam mitra sektor keamanan dan pertahanan, sebagai anggota pendiri AS bertanggung jawab mendorong keamanan dengan sekutu Eropa agar tidak ada perpecahan aliansi dan menjaga NATO agar tetap hidup dan relevan (Sloan, 2002). Meskipun Perang Dingin berakhir AS tetap dukungan operasi global dan menjaga keamanan kolektif NATO. Hal ini menciptakan masalah *free-riding* yang berkelanjutan antara AS dengan sekutu Eropa, dimana negara-negara Eropa menikmati manfaat keamanan dari keanggotaan NATO, meskipun tidak membayar anggaran yang memadai (Odehnal, 2015).

Selama puluhan tahun AS menganggap NATO sebagai komponen utama kebijakan luar negeri, AS juga menjadi kontributor terbesar NATO (Kaufman, 2017) AS menempatkan NATO sebagai pilar keamanan transatlantik. Perubahan kepemimpinan AS, dari Barack Obama ke Donald Trump membawa kekhawatiran bagi organisasi akan perubahan sikap AS ke NATO. Pada era kepemimpinan Bill Clinton, AS berkomitmen dalam memperkuat dan memperluas peranan NATO dalam operasi *out-of-area* yang mengukuhkan aliansi sebagai aktor keamanan kolektif. Clinton memandang NATO sebagai sarana utama untuk membangun

tatanan demokrasi liberal di wilayah Eropa, ditandai oleh *recommitment* dan ekspansi ke Eropa Timur (Song, 2016). Peranan NATO terhadap AS semakin dirasakan ketika serangan 11 September 2001. Bush mengubah arah kebijakan luar negeri AS ke War On Terrorism dengan melibatkan NATO di misinya dengan mengaktifkan Pasal 5, operasi pertahanan kolektif (NATO, 2025b).

Sementara itu di bawah kepemimpinan Obama, AS menetapkan NATO sebagai pilar utama tatanan keamanan global. Obama menilai NATO merupakan aktor penting untuk stabilitas global yang terlihat dalam KTT NATO 2016 di Warsawa, Presiden Obama menegaskan kewajiban melaksanakan Pasal 5 terhadap keamanan bersama yang diusahakan melalui tindakan memerangi teroris, kewajiban anggaran 2% dari PDB negara, dan perkuatan struktur pertahanan dan pencegahan NATO, mulai dari peralatan militer dan kesiapan pasukan (Pellerin, 2016).

Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden dalam Pemilihan Presiden 2016 membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih nasionalistik dengan slogannya *America First* dimana Trump memprioritaskan kepentingan domestik daripada internasional. Perubahan kepemimpinan membawa perubahan cara pandang terutama dalam hubungan AS dengan NATO yang sudah terjalin selama hampir 70 tahun. Hal tersebut dikarenakan gaya kepemimpinan dan politik Trump dinilai berbeda dari kepemimpinan sebelumnya.

Pada masa kampanye pemilihan presiden AS 2016, Trump menyebut NATO sebagai “*obsolete*”, yang berarti kuno atau ketinggalan zaman. Trump

menganggap kehadiran NATO sebagai aliansi militer sudah tidak relevan di era sekarang. NATO tidak terlibat dalam ancaman modern melawan Terorisme dan disebut sebagai beban finansial bagi AS. Sikap yang dihadirkan Trump berbanding terbalik dengan James N. Mattis, Menteri Pertahanan AS 2017-2019, yang menggambarkan NATO sebagai aliansi militer yang penting bagi AS (Kaufman, 2017).

Meskipun pemimpin AS mengakui keunggulan nilai dari NATO, kritik yang ditujukan kepada sekutu terkait *burden-sharing* kerap disinggung dalam berbagai kesempatan. Secara historis, beberapa presiden menyinggung perkara sekutu yang tidak memberikan anggaran secara maksimal untuk keamanan dan pertahanan mereka. Di eranya, Bush dan Obama meminta keanggotaan NATO untuk meningkatkan komitmen anggarannya. Dalam Bucharest Summit 2008, Bush mengatakan “*I will encourage our European partners to increase their defense investment.*” yang bermaksud untuk meningkatkan kesadaran sekutu NATO untuk meningkatkan investasinya ke NATO (Benitez, 2019).

Permasalahan anggaran menjadi topik persoalan yang selalu dibahas oleh Trump. Dalam wawancara kampanye Pilpres 2016 dengan The Washington Post, Trump memberikan pendapatnya terkait aliansi militer,

“*NATO was set up when we were a richer country. We’re not a rich country anymore. We’re borrowing, we’re borrowing all of this money. NATO is costing us a fortune and yes, we’re protecting Europe with NATO but we’re spending a lot of money.*”

Trump menggambarkan NATO sebagai anakronisme dari versi kejayaan AS yang di masa kini AS sudah menanggung beban finansialnya terlalu besar.

Trump merasa NATO lebih banyak melindungi sekutu Eropa dibanding AS menerima manfaat yang seimbang. Di akhir kata Trump meragukan kerelevansian NATO di era sekarang (Freisleben, 2016).

Kritik tersebut masih berlanjut setelah Trump dilantik menjadi presiden AS. Dalam KTT NATO 2017 di Brussels, Presiden Trump mengecam negara-negara anggota NATO secara langsung karena tidak memenuhi kewajiban finansial kepada aliansi. Lebih dari setengah anggota NATO tidak memenuhi anggaran militernya, hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemerintah AS. Dalam kesempatan yang sama Trump mengancam untuk tidak menegaskan kembali komitmen AS terhadap Pasal 5 NATO yang menjadi prinsip dasar pertahanan kolektif AS. Pernyataan yang disampaikan oleh Trump menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa akan kesediaan AS untuk melindungi negara anggota apabila terjadi serangan (Diamond, 2017).

Ekspresi negatif Trump yang ditujukan pada NATO dan perilaku sekutu AS mendapat sorotan dari mantan komandan tertinggi militer NATO, Admiral James Stavridis, *“The alliance is at a moment of high tension. Something is new and dangerous.”* Menurutnya apa yang Trump katakan merupakan sesuatu ketegangan yang berisiko dan baru bagi aliansi tersebut. Nada kritik yang Trump sampaikan secara publik lebih tajam dan memecah-belah, berbeda dari presiden-presiden AS sebelumnya. Trump juga menyerang NATO sebagai sebuah organisasi dengan mempertanyakan peran NATO sebagai bagian fundamental dari Keamanan Nasional AS. Meskipun Trump bukanlah satu-satunya presiden yang mengkritik sekutu NATO, namun Trump mempertanyakan dua hal yang pemimpin sebelum

hindari. Trump secara terbuka mempertanyakan peran fundamental NATO bagi keamanan nasional AS dan mempertanyakan komitmen Pertahanan AS kepada sekutu NATO. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran negara-negara keanggotaan, bahwa di bawah pemerintahan Trump, terdapat kemungkinan AS tidak akan membantu dalam menghadapi serangan asing (Benitez, 2019).

Selain mengkritik NATO sebagai organisasi, Trump mengkritik negara-negara anggota NATO, khususnya Jerman. Dalam NATO Summit 2018, Trump secara terbuka menuduh Jerman “*totally controlled by Russia*” karena ketergantungan terhadap pasokan energi dari Rusia melalui proyek pipa gas Nord Stream 2. Menurut Trump kerja sama yang terjalin antara Jerman dan Rusia merupakan hal yang tidak pantas dan seharusnya tidak terjadi karena dapat memperburuk NATO, “*and you tell me if that is appropriate because I think it’s not,*” Sebelum Trump mengkritik keengganan Jerman untuk meningkatkan anggaran pertahanan di NATO dengan menyebutnya “*free-riding*” (Meredith & Turak, 2018).

Orientasi politik luar negeri AS dibawah kepemimpinan Trump menunjukkan pergeseran dari multilateralisme menuju pendekatan yang lebih transaksional yang berfokus pada prioritas kepentingan AS. Hal ini sejalan dengan doktrin *America First* yang menempatkan prioritas kepentingan domestik dan efisiensi biaya untuk kerja sama internasional, di mana setiap komitmen yang terjalin dinilai berdasarkan sejauh mana memberikan keuntungan strategis dan ekonomi bagi AS. Diplomasi ini didasarkan pada logika *quid pro quo* yang berarti tindakan satu dilakukan dengan imbalan bernilai sama, sehingga cenderung skeptis

terhadap nilai organisasi maupun institusi multilateral yang manfaatnya tidak langsung terlihat dan dirasakan oleh kepentingan AS serta memandang dunia sebagai *zero-sum game* (Henke, 2017). Kebijakan dalam pemerintahan Trump menunjukkan bahwa mereka memandang keamanan dan ekonomi sebagai hal yang saling terikat terhadap keuntungan. Meskipun dinamika antara AS dan NATO terjalin dalam retorika konfrontatif yang menyerang dan menciptakan ketidakpastian bagi sekutu NATO, komitmen AS terhadap aliansi pertahanan tetap berlangsung demi kepentingan strategi bersama.

Keputusan politik tidak hanya dihasilkan dari faktor sistem internasional dan negara, tetapi juga faktor individu. Melalui penelitian ini penulis tertarik untuk melihat sejauh mana karakter, latar belakang, dan preferensi individu seorang pemimpin dapat membentuk arah kebijakan luar negeri suatu negara. Analisis idiosinkratik dipilih karena mampu menjelaskan peran sentral individu dalam membuat keputusan dan menentukan arah kebijakan suatu negara. Meskipun dalam struktur negara dan internasional yang relatif sama, pergantian pemimpin dapat menghasilkan perbedaan kebijakan berdasarkan karakteristik pemimpin.

Analisis faktor idiosinkratik dapat menjadi alat prediksi arah kebijakan AS terhadap NATO di bawah kepemimpinan Trump di periode 2024-2028, apakah Trump akan kembali menekan negara sekutu untuk meningkatkan kontribusi militer dan mengancam mengurangi komitmen AS terhadap keamanan kolektif, serta mempertahankan sikap independen skeptis terhadap NATO. Lantaran dalam periode pertamanya, 2017-2021, Trump memberikan sikap tidak pasti terhadap NATO yang merupakan pertama kalinya presiden AS memberikan pendapat

konfrontatif kepada NATO. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada faktor idiosinkratik Donald Trump yang mampu memengaruhi sikap AS terhadap NATO pada periode 2017-2021 menggunakan teori Idiosinkratik yang melibatkan sisi psikologis Trump.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan, berikut:

“Bagaimana faktor idiosinkratik Donald Trump memengaruhi sikap ambiguitas Amerika Serikat terhadap NATO 2017-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor idiosinkratik Donald Trump memengaruhi perubahan sikap dan kebijakan AS terhadap NATO selama masa kepemimpinannya 2017-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian ini secara akademis, diantaranya:

1. Penelitian ini berkontribusi menambah wawasan pembaca terkait sejauh mana faktor individu dibandingkan faktor struktural atau sistematis mampu berperan dalam membentuk arah atau sikap politik suatu negara.

2. Memperkaya karya penelitian serupa yang dapat menjadi pengembang atau pembanding informasi di masa depan.
3. Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber dalam pembuatan penelitian yang sama bagi studi Amerika Serikat dan gaya politik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dengan studi penelitian ini secara pragmatis, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi publik agar lebih terinformasi tentang bagaimana kepribadian seorang pemimpin dapat memengaruhi arah politiknya.
2. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi instansi negara maupun swasta untuk memprediksikan sikap AS ke NATO di periode kedua Donald Trump.
3. Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi pengamat dan akademisi untuk memahami hubungan antara individu dan perilaku negara, dalam konteks perubahan kepemimpinan dan dampaknya dengan organisasi internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ilmiah, sangat penting untuk memperhatikan hasil-hasil studi terdahulu agar penelitian yang dilakukan tidak bersifat repetitif dan terhindar dari unsur plagiarisme. Para peneliti terdahulu menunjukkan pendekatan

dan fokus pembahasan yang beragam, berikut tulisan-tulisan dari peneliti sebelumnya yang turut membahas studi kasus yang sama.

Artikel jurnal pertama berjudul *After Credibility: American Foreign Policy in the Trump Era* yang ditulis oleh Keren Yarhi-Milo (2020). Penelitian ini membahas terkait bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump memengaruhi gaya kredibilitas AS dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini menunjukkan krisis dalam pemerintahan Trump bukan berasal dari kebijakan yang dibuat, tetapi pada krisis kepercayaan (*credibility gap*) dari aktor dalam negeri maupun luar negeri, bahkan diperhitungkan tiga per empat penduduk AS tidak menganggap Trump dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penulis menegaskan bahwa Trump mengalami krisis kepercayaan yang serius karena sikapnya yang inkonsisten, retorik, dan sering kali bertolak belakang dengan kebijakan sebagaimana seharusnya dijalankan. Dalam pemerintahannya Trump memberikan pola yang berubah-ubah, seperti membatalkan komitmen krusial yang telah disepakati sejak dulu seperti mundur dari Paris Climate Agreement dan memberikan pertanyaan yang sering bertentangan, hal ini memberikan keraguan akan keseriusan AS dalam menjalin kerja sama. Dalam konteks politik internasional, penulis mengaitkan *credibility gap* dengan dua konsep reputasi negara, yang pertama *signaling reputation*, reputasi yang muncul dari rekam jejak aktor dalam melakukan ancaman atau serangan dan menjaga komitmen. Kemudian *general reputation* yang merujuk pada reputasi yang lebih luas menyangkut karakter aktor, seperti apakah aktor kooperatif dan tulus. Berdasarkan analisis penulis melalui isu Nuklir Iran, perilaku Trump menunjukkan hilangnya kredibilitas ganda, AS gagal menunjukkan

konsistensi janji diplomatiknya dan AS kehilangan citra positif dapat dipercaya dan berkomitmen. Disisi lain, penulis memunculkan paradoks antara kredibilitas reputasional dan kekuatan material AS, penulis tetap mengakui bahwa kekuatan politik dan militer AS masih memiliki daya tawar yang tinggi terhadap negara-negara tertentu, kredibilitas yang AS miliki tidak serta merta hancur. Penulis menekankan kerusakan reputasi internasional AS di bawah Trump merupakan konsekuensi dari gaya kepemimpinannya yang tidak stabil. Namun, penelitian ini belum sepenuhnya menjelaskan kontradiksi antara penurunan kredibilitas diplomatic dan kekuatan daya tawar negara di era Trump.

Artikel jurnal yang kedua berjudul *Trump, NATO and the Future of Europe's Defence* yang ditulis oleh Benjamin Schreer (2019). Penelitian ini membahas terkait pengaruh kebijakan luar negeri AS terhadap dinamika hubungan NATO dan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Penulis berpendapat perjalanan kepemimpinan Trump membawa pergeseran paradigma yang signifikan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan telah merujuk pada unilateralisme dengan pendekatan transaksional, Trump cenderung memandang aliansi dan sekutunya, NATO sebagai sebuah beban finansial yang hanya mencari keuntungan strategis. Schreer berpendapat meskipun Trump memberikan kritik tajam kepada NATO, kebijakan AS tidak menunjukkan upaya untuk melemahkan atau menarik diri dari aliansi militer tersebut. Sebaliknya, pemerintahan Trump justru meningkatkan pasukan AS di Eropa, melalui *peningkatan European Deterrence Initiative* (EDI) mencapai 6,5 miliar USD, reaktivasi militer AS di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan adanya persepsi ancaman yang sama antara

AS dan Eropa, dukungan penuh dari Kongres dan Pentagon terhadap fungsi NATO, dan struktur politik dan militer yang terintegrasi dengan baik yang dimiliki NATO mampu menghadapi tantangan internal dan eksternal. Schreer menyimpulkan bahwa Trump lebih banyak menimbulkan gangguan politik dan ketidakpastian diplomatik daripada perubahan kebijakan strategis terhadap NATO meskipun transaksionalisme dan nasionalisme *America First* tetap menjadi pendekatan Trump, NATO tetap menjadi pilar utama aliansi militer keamanan transatlantik dan instrumen penting dalam kebijakan luar negeri AS. Meskipun penelitian ini telah secara mendalam membahas retorika anti-NATO yang dikatakan Trump, namun penulis tidak membahas faktor kepribadian Trump yang merefleksikan sikap Trump terhadap NATO.

Karya tulis selanjutnya berjudul *DONALD TRUMP AND THE BATTLE OF THE TWO PERCENT: How will the US election impact on the conflicts over defence spending within NATO?* yang ditulis oleh Mikkel Runge Olesen (2020). Penelitian ini membahas konflik politik dan diplomatik antara AS dan sekutu NATO dalam hal pembagian beban pertahanan (*burden sharing*). Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan dan kritik Trump terhadap tuntutan sekutu dalam memenuhi target anggaran pertahanan sebesar 2% dari PDB negara. Penulis menjelaskan bagaimana terdapat ketidakseimbangan dalam pembayaran anggaran antara AS dan sekutu Eropa. Trump secara terbuka menuntut agar seluruh negara anggota NATO tidak hanya membayar sesuai kesepakatan, tetapi menaikkan anggaran hingga dua kali lipat. Penulis berpendapat ini mencerminkan karakter kebijakan yang transaksional dan konfrontatif, di mana komitmen sekutu terhadap aliansi militer ditentukan oleh

kontribusi finansial masing-masing. Penulis berpendapat tekanan yang AS berikan kepada sekutu NATO akan tetap berlanjut meskipun Trump sudah tidak kembali memimpin, menurutnya tuntutan ini merupakan isu struktural, tidak bergantung pada siapa presidennya, Washington juga memiliki pandangan bahwa sudah seharusnya sekutu menanggung tanggung jawab yang lebih besar dalam misi keamanan bersama. Namun, dalam konteks kepemimpinan Trump hal ini menjadi kontroversi dan tegang karena Trump menggunakan retorika yang asertif dan cenderung mengancam untuk mengabaikan kebijakan strategis lainnya. Penelitian ini menekankan dampak dari retorika Trump yang membuat negara berada dalam posisi dilema antara mempertahankan hubungan baik dengan AS atau memenuhi biaya pertahanan 2% di saat keterbatasan ekonomi. Menurut penulis, isu beban anggaran bukan sekedar isu, namun juga *hint* adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri AS. Kajian dari karya ini lebih menitikberatkan kepada masa kampanye Trump, belum secara kompleks mengulas sikap AS terhadap NATO pasca kemenangan Trump secara mendalam, meskipun begitu penulis dapat memahami perilaku idiosinkratik Trump yang bersifat transaksional sebagai faktor yang memengaruhi retorikanya.

Karya tulis selanjutnya berjudul *Burden-sharing in NATO: The Trump effect won't last* yang ditulis oleh Peter Viggo Jakobsen and Jens Ringsmose (2017). Penelitian ini membahas tentang dinamika pembagian beban pertahanan dalam struktur NATO dan pengaruh kebijakan Presiden Trump terhadap aliansi militer tersebut dengan fokus apakah *Trump effect* dalam isu beban pertahanan akan bertahan lama atau tidak dan memberikan efek jangka panjang terhadap solidaritas

NATO serta kontribusi militer negara sekutu. Penulis berpendapat kebijakan Trump dianggap sebagai kelanjutan pola historis terkait penekanan AS terhadap sekutunya, bukan sebagai perubahan yang radikal ataupun asertif. Secara realitas, Trump menggunakan pendekatan yang lebih retorik dengan mengancam akan melemahkan komitmen AS terhadap NATO jika sekutu tidak melakukan kewajiban pembayaran anggaran, namun penulis menilai ancaman tersebut tidak strategis dan tidak serius. Jakobsen dan Ringmose berpendapat *Trump effect* hanya bersifat sementara karena kepentingan geopolitik AS terhadap Eropa terlalu besar untuk AS menarik diri dan melemahkan eksistensinya dari NATO.

Karya tulis berjudul *The Leadership Style of U.S. President Donald J. Trump* yang ditulis oleh Aubrey Immelman (2020) penelitian ini bertujuan untuk memprediksi gaya kepemimpinan dan kebijakan Trump dengan menganalisis pola kepribadiannya menggunakan pendekatan psikologi politik yang dikembangkan oleh Theodore Millon. Penelitian ini menggunakan *Millon Inventory of Diagnostic Criteria* (MIDC), alat analisis psikologis untuk menilai kepribadian berdasarkan informasi biografis dan media. Kepribadian yang dikaji mencakup: *dominant, dauntless, ambitious, outgoing, accommodating, aggrieved, erratic, distrusting, retiring, reticent, conscientious, contentious*. Melalui *Psychodiagnostic meta-analysis*, Immelman menemukan bahwa dari kedua belas kepribadian tersebut, hanya tiga pola kepribadian (*key personality*) yang konsisten tinggi, yaitu *outgoing* pemimpin yang ekstrovert memiliki kecenderungan untuk bertindak impulsif dan gegabah, *ambitious* individu narsistik memiliki sikap sosial yang tenang, namun dapat merespons secara refleksi dengan amarah terhadap kritik, dan *dominant*

pemimpin dengan sikap dominan dikenal sebagai pemimpin yang kuat tetapi cenderung kurang empati dan mudah tersinggung. Melalui *key personality patterns* tersebut, Trump digolongkan termasuk tipe *high-dominance charismatic leader* dengan kata lain kepemimpinannya dikombinasikan dengan ekstroversi dan kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun secara studi psikologis analisis kepribadian Trump dapat dibuktikan, adanya pemberian skor penilaian yang dilakukan penulis menimbulkan potensi *bias* dalam menjustifikasi perilaku politik.

Selanjutnya dalam Idiosinkrasi Donald Trump Terhadap Haluan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang ditulis oleh Ahmad Ghufran Akbar. Penelitian ini bertujuan menganalisis idiosinkrasi Donald Trump untuk menemukan bagaimana karakteristik kepemimpinannya berdasarkan sikap, penilaian, dan perilakunya dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri AS yang diusung sejak menjabat. Penelitian ini menghasilkan bahwa Donald Trump merupakan pemimpin dengan karakteristik narsistik dan ekspansionis. Narsistik Trump terlihat dalam kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam mendorong perekonomian AS tanpa bergantung oleh kerja sama multilateral. Dibandingkan dengan kerja sama multilateral, Trump cenderung terbuka terhadap kerja sama bilateral, preferensi Trump terhadap kerja sama bilateral dianggap memberi AS posisi dominan dan keuntungan timbal balik yang lebih jelas dibandingkan dengan skema kerja sama multilateral yang dinilai mengurangi pengaruh AS. Hal ini sesuai dengan kepribadian Trump yang berambisi tinggi dalam merombak kebijakan luar negeri AS serta rasa percaya diri yang tinggi tanpa mengikuti aturan terdahulu. Selain itu, Gaya kepemimpinan *crusader expansionist*

yang dimiliki oleh Trump merupakan tipe seorang individu yang tidak ingin kehilangan kendali yang dimiliki. Hal tersebut ditunjukkan oleh sikap, penilaian, dan perilakunya dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan fokus kepada ekonomi untuk menyokong pendanaan pertahanan nasional AS.

Penelitian terakhir yang berjudul Analisis Karakteristik Personal Donald Trump Dalam Kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* Ilham Fadil selaku penulis menganalisis personal karakteristik Donald Trump berdasarkan dikeluarkannya perintah eksekutif terkait penangguhan pengungsi imigran dari tujuh negara Islam yang Ia yakini menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas AS. Melalui penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan *Personal Characteristic of Political Leader* yang dikembangkan oleh Margareth Hermann. Hasilnya Trump memiliki sikap proteksionis sebagai bentuk nasionalisme Donald Trump dalam melindungi Amerika Serikat dari potensi ancaman dari luar. Selain itu, Trump memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan memposisikan dirinya sebagai sosok yang dapat merubah kondisi. Melalui penerapan *banned* imigran dari negara muslim Trump menunjukkan dominasinya atas kelompok imigran di AS, imigran dimaknai Trump sebagai teroris yang kan merugikan kepentingan AS yang menunjukkan rendahnya kompleksitas konseptual Trump. Kebijakan Trump juga mengindikasikan tingginya ketidakpercayaan terhadap pihak lain, dalam hal ini imigran. Trump memiliki kecurigaan terhadap mereka yang memasuki wilayah AS dan melakukan serangan terorisme. Pemimpin politik memiliki peran dalam mengarahkan kebijakan pemerintahannya menuju

hubungan yang bersifat agresif maupun hubungan yang lebih damai dan kooperatif dengan negara lain. Berdasarkan karakteristik tersebut ditemukan bahwa Trump merupakan *aggressive leader*, tipe pemimpin yang dominan dan berorientasi pada kontrol kekuasaan dalam hubungan politik, terutama dalam kebijakan luar negerinya.

Dari beberapa kajian dapat disimpulkan bahwa AS dan NATO memiliki hubungan yang kritis dan penuh ketidakpastian semenjak kepemimpinan Donald Trump. Dari ketujuh penelitian tersebut, terlihat masih didominasi oleh dinamika hubungan AS dan NATO, serta retorika Trump terkait sekutu NATO. Penulis menemukan belum ada pembahasan mengenai latar belakang dinamika AS dan NATO dalam analisis faktor idiosinkratik individu yang secara eksplisit menempatkan pendekatan transaksional Donald Trump sebagai salah satu faktor idiosinkratiknya. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada keterkaitan kepribadian transaksional Donald Trump terhadap hubungan AS dan NATO pada periode 2017-2021 dengan mengintegrasikan pendekatan analisis tingkat individu melalui *Leadership Traits Analysis*.

1.5.2 Pendekatan Idiosinkratik

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat Analisis Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy Analysis* (FPA) yang berfokus pada bagaimana suatu kebijakan luar negeri dibuat dengan menjelaskan dan memprediksi perilaku secara individu maupun kolektif yang menjadi faktor perubahan dalam politik internasional. Studi ini berfokus pada proses aktor dan unit dalam membentuk sebuah negara atau bangsa, seperti individu maupun birokrasinya (Hudson & Vore,

1995). Selain itu, studi ini juga dapat menjelaskan perilaku dan praktik hubungan antara berbagai aktor, seperti negara-negara, negara-aktor dalam sistem internasional (Alden & Aran, 2017).

David Singer dalam (Alden & Aran, 2017) membuat skema terkait Hubungan Internasional dalam menghadapi dinamika politik internasional yang berfokus pada tingkat sistem internasional, tingkat negara, dan tingkat individu. Diantara ketiga fokus tersebut, FPA menekankan pada tingkat negara dan individu sebagai variabel dalam memahami sifat sistem internasional (Alden & Aran, 2017). Waltz (1959) mengemukakan terdapat tiga tingkat utama dalam analisis studi Politik Internasional yang memiliki pengaruh terhadap satu sama lain dan sebagai penyebab perang, yaitu tingkat individu, tingkat negara, dan tingkat sistem internasional.

Dalam tingkat individu berfokus pada manusia itu sendiri, dari bagaimana perilaku manusia yang dipengaruhi oleh karakteristik, ambisi yang dimiliki, dan keyakinan optimis dan pesimisnya. Waltz menggambarkan negara sebagai suatu entitas yang bertindak sejalan dengan dinamika yang terjadi di dalamnya. Fokusnya pada internal negara, sistem dan struktur pemerintahannya. Waltz menempatkan sistem internasional sebagai penentu utama kebijakan luar negeri yang berfokus pada struktur internasional yang dianggap suatu yang anarkis, keseimbangan kekuatan, dan distribusi kemampuan di antara negara-negara. Menurutya terlepas dari bagaimana kepribadian individu, sistem anarki memaksa negara untuk bertindak secara koersif (Waltz, 1959).

Analisis sikap ambiguitas AS ke NATO akan menggunakan level analisis individu yang mana penulis menggunakan pendekatan idiosinkratik yang merupakan level paling dasar namun fundamental dalam *Foreign Policy Analysis*. *Idiosyncratic* merupakan perpaduan antara *Ideology* yang berarti keyakinan atau gagasan yang membentuk dasar pemikiran dan *Synchratic* yang berarti kombinasi dari berbagai perbedaan. Secara umum *Idiosyncratic* berarti sesuatu yang khas milik individu, unik, atau cenderung berbeda dari biasanya. Konsep idiosinkratik mulai berkembang setelah diperkenalkan oleh Margaret Hermann pada 1980 dalam penelitiannya terkait perilaku kebijakan luar negeri 45 kepala negara dengan menggunakan analisis karakteristik pribadi. Idiosinkratik dikenal sebagai persepsi elit yang didefinisikan sebagai hal-hal yang menyatu pada pemimpin (*decision maker*) yang mampu memengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan, dan pengambilan keputusan (Anugerah, 2016). Dalam konteks Hubungan Internasional, analisis idiosinkratik penting untuk menjelaskan bagaimana karakteristik dan karakter pribadi seorang pemimpin dapat memengaruhi perilaku negara terhadap negara lain dan proses pembentukan kebijakan luar negeri, terlepas dari faktor sistem politik maupun kondisi internasional.

Dalam studi Psikologi, karakteristik dan kepribadian seseorang dapat direfleksikan melalui pola perilaku dan bagaimana seseorang mengambil suatu keputusan. Menurut Greenstein (1967) keputusan politik bukan sekadar hasil struktural, tetapi juga refleksi dari kepribadian individu yang memegang peran sentral dalam suatu sistem. Meskipun pendekatan melalui analisis idiosinkratik

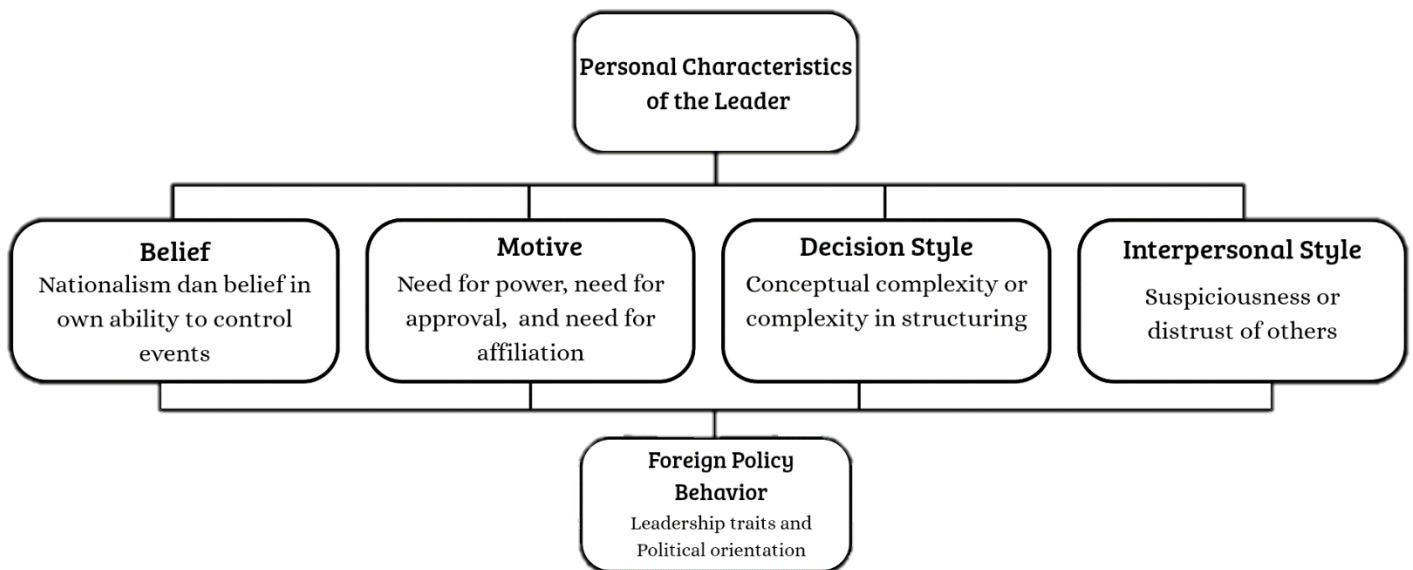
banyak diperdebatkan karena dianggap subjektif dan sulit diverifikasi, namun untuk individu yang menempati posisi strategi di sebuah negara menjadi faktor penting dalam bernegara. Sistem politik terdiri dari individu yang bertindak dengan memahami psikologi individu dapat memudahkan dalam pemahaman bagaimana sebuah keputusan diambil dan mengapa seorang pemimpin mengambil tindakan yang berbeda-beda dalam konteks isu yang sama (Greenstein, 2013).

Melalui *Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice* (Caprara et al., 2006) memperkuat bahwa perilaku politik seseorang tidak hanya dibentuk oleh faktor struktural, tetapi juga kepribadian dan *personal values* yang melekat pada setiap individu. Terdapat keterkaitan antara *traits* dan *personal values* dalam membentuk orientasi politik individu dan pilihan politiknya. Barber (1977, *The psychological assessment of political leaders*, hal.181) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan dihasilkan dari pengalaman politik awal yang diperkuat dengan pengalaman-pengalaman setelahnya yang berhasil membentuk pola perilaku dan cara berpikir dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam memahami hubungan bagaimana faktor idiosinkratik dapat memengaruhi orientasi suatu negara dan membuat keputusan. Penelitian ini akan menggunakan *Personal Characteristic of Political Leaders* yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann (1980). Alat analisis ini menekankan bahwa karakteristik psikologis dan persepsi individu pemimpin memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan suatu negara. Analisis kepribadian ini dapat digunakan untuk mengetahui latar belakang pemuatan suatu kebijakan dan memprediksi langkah politik yang akan diambil oleh pemimpin negara apakah ke

arah hubungan yang agresif (*aggressive leaders*) atau ke arah hubungan yang damai dengan negara lain (*conciliatory leaders*).

Hermann mengidentifikasi enam karakteristik pribadi yang menjadi indikator penting dalam menjelaskan pola perilaku kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu *nationalism* (nasionalisme), *belief in one's own ability to control events* (keyakinan akan kemampuan mengontrol peristiwa), *need for power* (kebutuhan akan kekuasaan), *need for affiliation and need for approval* (kebutuhan akan afiliasi atau hubungan sosial), *conceptual complexity or complexity in structuring* (kompleksitas berpikir konseptual), *suspiciousness or distrust of others* (ketidakpercayaan terhadap pihak lain). Keenam karakteristik kemudian dibagi menjadi empat dimensi karakteristik utama, yaitu *beliefs* (keyakinan), *motives* (motif), *decision style* (gaya pengambilan keputusan), *interpersonal style* (gaya interpersonal).



Gambar 1. 1 Personal Characteristics of Political Leaders (Herman 1980)

1. **Beliefs** (keyakinan), mengacu pada asumsi dasar seorang pemimpin tentang dunia dan perilaku individu, seperti apakah peristiwa dapat diprediksi, tentang konflik sebagai hal dasar interaksi antarmanusia, dan kemampuan mengendalikan suatu peristiwa. Hermann mengasumsikan ketika pemimpin bertanggung jawab untuk merencanakan atau memulai suatu tindakan, mereka meyakini adanya kemampuan untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi (Hermann, 2003).
2. **Motives** (motif), mencerminkan apa yang menjadi tujuan seorang pemimpin atau *strengths* yang mendorong seorang pemimpin bertindak atau membuat keputusan. Dalam hal ini, *need for power*, *need for affiliation*, dan *need for approval* menjadi motif yang paling banyak digunakan oleh pemimpin. Motif seorang pemimpin memengaruhi cara Ia menginterpretasikan

lingkungan politiknya dan bagaimana strategi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. **Decision style** (gaya pengambilan keputusan) merujuk pada pendekatan dalam membuat keputusan politik. Setiap pemimpin memiliki gaya pengambilan keputusan yang khas. Dalam *framework* Hermann berfokus pada *conceptual complexity*, yaitu kemampuan seseorang dalam mengorganisir dan memproses informasi secara kompleks. Driver (1977; Hermann, 1980) perbedaan kompleksitas konseptual pada masing-masing pemimpin memengaruhi tingkat keagresifan pemimpin dalam kebijakan luar negerinya.
4. **Interpersonal style** (gaya interpersonal), mengacu pada bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan pemimpin lainnya. Terdapat dua gaya, *paranoid* (kecurigaan berlebihan) dan *Machiavellianism* (perilaku tidak bermoral dan manipulatif). Dalam *framework* ini kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap orang lain menjadi fokus gaya interpersonal.

Keempat karakteristik tersebut digunakan untuk memahami bagaimana perbedaan kepribadian dan orientasi psikologis seorang pemimpin dapat menciptakan arah politik yang berbeda. Berdasarkan karakteristik tersebut, Melalui analisis tersebut, Hermann menemukan bahwa kepribadian pemimpin membentuk dua orientasi dasar dalam memandang dinamika internasional, yaitu *independent orientation* dan *participatory orientation*. Kedua orientasi ini mencerminkan cara pemimpin menilai hubungan antarnegara, dan kepercayaan terhadap pihak lain.

Pemimpin agresif dengan orientasi independent cenderung melihat sistem internasional sebagai arena kompetitif dan unilateralis, karena mereka menunjukkan tingginya kebutuhan akan kekuasaan, rendahnya kompleksitas konseptual, adanya ketidakpercayaan terhadap pihak lain, sikap, dan kecenderungan mempercayai bahwa mereka memiliki kontrol atas peristiwa yang terjadi. Sedangkan pemimpin politik konsiliatori akan membentuk orientasi partisipatif terhadap urusan luar negeri dan mengarah pada perilaku yang menekankan partisipasi dengan aktor eksternal yang lebih kooperatif. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kebutuhan akan afiliasi atau berhubungan baik, tingginya kompleksitas konseptual, adanya kepercayaan terhadap pihak lain, rendahnya sikap nasionalisme, dan cenderung menunjukkan ketidakyakinkan pada kemampuan untuk mengontrol peristiwa yang terjadi (Hermann, 1980).

Berdasarkan keenam karakteristik, Hermann dan Falkowski memetakan kembali menjadi lima dimensi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu:

1. *Expansionist*

Pemimpin dengan kepribadian ekspansionis cenderung berorientasi pada kekuasaan dan dominasi yang cenderung konfrontatif. Kepribadian ini memiliki keinginan yang besar untuk mengontrol (*high need for power*), memiliki kelemahan untuk terbuka terhadap berbagai perspektif (*low conceptual complexity*), memiliki rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain (*high distrust of others*). Meskipun demikian, individu dengan karakter ini, cenderung lebih nasionalis dalam urusan kepentingan negara (*high nationalism*). Tidak

bergantung pada hubungan sosial (*low need of affiliation*), dan memiliki keyakinan untuk mengontrol suatu peristiwa yang terjadi (*high believe in control over events*).

2. *Active Independent*

Active Independent menunjukkan pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan tanpa merubah suatu tatanan atau bertindak diluar norma. Kepribadian ini memiliki semangat nasionalisme yang tinggi (*high nationalism*), kemauan yang besar untuk membuka peluang baru (*high complexity*) dengan percaya kepada orang lain (*low distrust of others*), sehingga mampu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain (*high need of affiliation*). Tipe pemimpin ini memiliki tingkat inisiatif yang besar (*high believe in own control*), meskipun tidak memiliki keinginan untuk menguasai kekuasaan (*low need for power*).

3. *Influential*

Tipe pemimpin ini menekankan pada kemampuan mempersuasif opini publik untuk mendorong kebijakannya dan mampu memengaruhi kebijakan luar negeri negara lain dengan menganggap kebijakan ataupun tujuannya lebih penting dari yang lainnya. Ciri-cirinya individu dengan tipe *influential* adalah *high nationalism, high complexity conceptual, high believe in own control, low need of affiliation, high distrust of others*, dan *high need for power*.

4. *Mediator*

Individu bersikap sebagai penengah perbedaan diantara negara. Pemimpin dengan karakteristik seperti ini berorientasi pada kompromi, diplomasi dan

penyelesaian konflik secara damai sehingga cenderung menghindari intervensi. Ciri-cirinya adalah *low nationalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high need of affiliation, high believe in own control, high need for power*.

5. *Opportunist*

Pemimpin dengan tipe oportunist merupakan pemimpin adaptif yang memutuskan kebijakan berdasarkan peluang yang menguntungkan. Individu golongan ini tidak terlalu menekankan kepentingan nasional yang sempit (*low nationalism*), mampu memahami situasi politik dari berbagai sudut pandang (*high conceptual complexity*), memiliki keyakinan yang rendah terhadap kendali (*low believe in own control*), tidak bergantung pada negara lain atau sebuah interaksi (*low need of affiliation*), tidak mudah mencurigai pihak lain, sehingga mampu membangun hubungan politik yang menguntungkan (*low distrust of others*), dan *low need for power*, yang berarti pemimpin tidak didominasi oleh kebutuhan kekuasaan.

6. *Participative*

Pemimpin cenderung melibatkan orang lain dalam proses politik dan pengambilan keputusan, seseorang dengan tipe partisipatif tidak memusatkan keputusan ada pada dirinya, namun keputusan berdasarkan keputusan Bersama. Ciri-cirinya *low nationalism, high conceptual complexity, low believe in own control, high need of affiliation, low distrust of others, low need for power*

Dalam menganalisis menggunakan *framework Leadership Traits Analysis* dapat memanfaatkan *content analysis* melalui pidato, wawancara maupun

pernyataan yang dibuat oleh tokoh pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai karakteristik pribadi para kepala pemerintahan yang menjadi subjek penelitian ini. Hermann berpendapat semakin sering pemimpin menggunakan kata-kata atau frasa tertentu, akan semakin terlihat bagaimana karakteristiknya (Hermann, 2003). Menurut Walter Weintraub, gaya bicara mencerminkan perilaku non-verbal yang khas. Dalam menganalisis perilaku verbal, dapat mengklasifikasikan tiga asumsi dasar; pola berpikir dan perilaku tercermin dalam seni berbicara; di bawah tekanan, pilihan struktur Bahasa mencerminkan mekanisme koping dalam artian menghindari kata tertentu sebagai bentuk pengendalian diri; dan sifat kepribadian dapat dideteksi berdasarkan struktur bahasa yang cenderung stabil dan tidak berubah-ubah.

1.5.3 Visualisasi Alur Berpikir



Gambar 1. 2 Kerangka Alur Berpikir

Penelitian ini berakar dari sikap AS terhadap NATO ketika pemerintahan Presiden Donald Trump dalam periode 2017-2021. Penelitian ini akan berfokus pada faktor idiosinkratik (*nationalism, belief in own ability to control, need for power, need for affiliation, conceptual complexity, dan distrust of others*) yang dapat memengaruhi sikap pemimpin suatu negara dengan menggunakan *framework* milik Herman (1980). Faktor idiosinkratik Trump dapat tercermin melalui speech act (tindak tutur), seperti pidato, wawancara, ataupun pernyataan yang dibuat oleh Trump.

Seperti bagaimana Trump menggunakan retorika dengan menyebut NATO "*obsolete*" untuk menunjukkan bahwa NATO sudah tidak relevan di masa sekarang. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut akan terlihat bagaimana kepribadian idiosinkratik Trump membentuk orientasi politik Trump yang memengaruhi sikap politik luar negeri AS yang lebih asertif terhadap NATO. Selain itu, serta dapat memperkirakan apakah Trump akan kembali memberikan tekanan kepada negara-negara sekutu agar meningkatkan kontribusi militer sekaligus menunjukkan kecenderungan untuk mengurangi komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan kolektif, serta mempertahankan sikap independen dan skeptis terhadap peran NATO.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Keyakinan

Keyakinan atau *belief* merujuk pada asumsi fundamental seorang pemimpin politik terhadap peristiwa yang terjadi di suatu negara. Keyakinan menjadi faktor psikologis yang memengaruhi bagaimana seorang pemimpin politik menafsirkan lingkungan politiknya dan menentukan strategi yang akan Ia gunakan. Dalam kerangka Hermann, dua bentuk keyakinan yang difokuskan adalah nasionalisme dan keyakinan atas kemampuan mengontrol peristiwa. Nasionalisme merupakan keyakinan terhadap kepentingan dan keunggulan bangsa sendiri, dimana individu memiliki ikatan yang kuat terhadap bangsanya. Sedangkan keyakinan atas kemampuan untuk mengontrol peristiwa merujuk pada sejauh mana pemimpin

percaya bahwa Ia mampu memengaruhi kondisi politik suatu negara (Hermann, 1980).

1.6.1.2 Motif

Motif merupakan alasan mengapa seorang pemimpin politik melakukan apa yang Ia lakukan. Dalam kerangka Hermann, terdapat tiga motif yang dimiliki oleh pemimpin politik, yaitu kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan penerimaan. Namun, dalam kerangka Hermann memfokuskan pada motif kebutuhan akan kekuasaan, perasaan yang dimiliki individu untuk membangun dan mempertahankan pengaruh, kekuasaan, atau kontrol atas orang lain. Serta motif kebutuhan akan afiliasi, yaitu kebutuhan untuk menciptakan hubungan hangat dengan pihak lain. Kedua motif tersebut memengaruhi jenis perilaku luar negeri yang ditentukan oleh presiden kepada pemerintahan mereka (Hermann, 1980).

1.6.1.3 Gaya Pengambilan Keputusan

Gaya pengambilan keputusan merujuk pada metode yang digunakan oleh pemimpin politik dalam mengambil keputusan. Komponen dari pengambilan keputusan meliputi keterbukaan terhadap informasi baru, preferensi terhadap tingkat risiko tertentu, kompleksitas dalam mengorganisir dan memproses informasi, serta kemampuan untuk menerima ketidakpastian. Dalam kerangka Hermann, Ia memfokuskan pada kompleksitas konseptual dalam mengorganisir dan memproses informasi, tentang sejauh mana seseorang mampu membedakan secara detail ketika membahas orang, tempat, ide, atau kebijakan. (Hermann, 1980).

Menurut Driver (1977) dalam (Hermann, 1980) perbedaan tinggi dan rendahnya kompleksitas konseptual dapat memengaruhi seberapa agresif pemerintah dalam memimpin kegiatan kebijakan luar negerinya. Orang dengan kompleksitas tinggi cenderung mengakui nuansa dan tidak melihat segala sesuatu secara hitam-putih.

1.6.1.4 Gaya Interpersonal

Gaya interpersonal merupakan cara khas yang digunakan oleh pemimpin politik dalam berinteraksi dengan pemimpin lainnya. Dalam kerangka Hermann, cara ini merujuk pada perasaan umum berupa keraguan, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap pihak lain yang ditunjukkan oleh pemimpin politik. Pemimpin politik memiliki kecenderungan untuk mencurigai dan meragukan motif ataupun tindakan orang lain (Hermann, 1980).

1.6.1.5 Transaksional

Dalam Hubungan internasional, transaksional didefinisikan sebagai pendekatan kebijakan luar negeri yang cenderung bersifat personalistik dan penuh pertimbangan politik domestic. Transaksional memprioritaskan pada keuntungan politik, konsolidasi kekuasaan, dan upaya mempertahankan posisi kepemimpinan. Sederhananya, pendekatan ini menganut pandangan dunia zero-sum, yang melihat keuntungan suatu negara sebagai kerugian bagi negara lain (Bashirov & Yilmaz, 2020).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Keyakinan

Keyakinan dalam penelitian ini merujuk pada keyakinan-keyakinan pribadi Donald Trump terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat dalam sistem keamanan global yang tercermin melalui pernyataannya mengenai NATO selama periode 2017-2021. Salah satu contohnya, persepsi nasionalisme Trump bahwa NATO membebani AS dalam hal dukungan finansial yang berat sepihak dan merugikan karena tidak adil dengan manfaat yang diterima oleh rakyat AS. Indikator dalam menentukan tinggi dan rendahnya keyakinan dapat terlihat dalam penggunaan kata tersirat yang menekankan kebanggaan nasional dan kepentingan nasional di atas kepentingan internasional, serta mencerminkan seberapa besar pemimpin memiliki kemampuan untuk memengaruhi situasi politik.

1.6.2.2 Motif

Motif dalam penulisan ini merujuk pada tujuan atau dorongan yang menjadi sikap dasar politik Trump yang direfleksikan dalam retorika agresifnya menyangkut NATO. Tujuan yang dimaknai Trump dalam retorikanya terhadap NATO adalah memaksimalkan prinsip *America First* yang dibawa oleh Trump dengan menekankan pada peningkatan kontribusi sekutu. Indikator dalam retorikanya dapat melalui penggunaan kata yang mencerminkan keinginan akan mendominasi dan mengatur pihak lain ataupun menunjukkan keinginan menjalin hubungan atau interaksi dekat dengan pihak lain

1.6.2.3 Gaya Pengambilan Keputusan

Gaya pengambilan keputusan mengacu pada gaya pembuat keputusan Donald Trump yang tercernin dalam retorika serta tindakannya terhadap NATO selama periode 2017-2021. Indikator dalam menentukan tinggi dan rendahnya kompleksitas konseptual dalam ditujukan melalui gaya pengambilan keputusan bagaimana pemimpin melihat sudut pandang dan menerima informasi baru. *High conceptual complexity* sering menunjukkan melalui kata mungkin (*possibly*), mungkin (*may*), terkadang (*sometimes*), cenderung (*tends*), dan kurang lebih (*approximately*). Sedangkan *low conceptual complexity* menunjukkan kata selalu (*always*), hanya (*only*), tanpa keraguan (*without a doubt*), benar-benar (*absolutely*), pasti (*certainly*), dan tidak dapat diubah (*irreversible*) (Hermann, 1980).

1.6.2.4 Gaya Interpersonal

Gaya interpersonal merujuk pada bagaimana interaksi Donald Trump dengan pihak lain, khususnya pemimpin negara sekutu NATO. Hermann memfokuskan pada sikap ketidakpercayaan terhadap pihak lain (Hermann, 1980). Indikator ini dapat ditentukan dari kata yang menyiratkan penilaian negatif terhadap kelompok luar. Sebaliknya jika kata yang digunakan tidak menandakan kewaspadaan terhadap pihak lain, identifikais menunjukkan ketidakpercayaan yang rendah kepada orang lain.

1.6.2.5 Transaksional

Transaksional dalam berpolitik dalam penelitian merujuk pada bagaimana Trump menggunakan pendekatan pendekatan dalam memandang NATO. Bashirov dan Yilmaz dalam artikelnya menjelaskan inti elemen dalam kebijakan luar negeri

transaksional yang menjadi acuan dalam melihat transaksional Trump terhadap NATO. Pertama, mengutamakan hubungan bilateral dibandingkan multilateralisme, sehingga cenderung menolak aliansi, lembaga, dan organisasi internasional. Kedua, berorientasi pada hasil keuntungan yang dapat diperoleh dalam waktu singkat, bukan komitmen dan manfaat jangka Panjang. Ketiga, transaksionalisme menolak pembuatan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan nasional, transaksionalisme tidak setuju terhadap sistem terbuka dan berbasis aturan. Keempat, menganut pandangan zero-sum dimana keuntungan bersifat relatif. Terakhir, individu yang menekankan pada kebijakan luar negeri transaksionalis sering dikategorikan sebagai seorang pemimpin populis, yang menginginkan kesuksesan jangka pendek yang mencolok (Bashirov & Yilmaz, 2020).

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa sikap AS terhadap NATO pada periode 2017-2021 dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik presiden Donald Trump berdasarkan kerangka Hermann, yaitu keyakinan (keyakinan untuk mengontrol sebuah peristiwa dan sikap nasionalisme), motif, gaya pengambilan keputusan, dan gaya interpersonal yang dikaitkan dengan pola ketidakpercayaan terhadap pihak lain. Kepribadian ini dicirikan dengan tingginya sikap nasionalisme Trump yang tertuang dalam slogan pemerintahannya "*America First*", tingginya keyakinan untuk mengontrol sebuah peristiwa, Trump memiliki motif akan kekuasaan yang tinggi, pengambilan keputusan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, tidak terlalu peduli dengan hubungan baik dengan sekutu atau mitra politik, dan memiliki

tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap orang lain. Sehingga Trump termasuk dalam tipe pemimpin yang agresif dengan kepribadian *expansionist*. Dalam penelitian ini, hal ini tercermin dalam bagaimana Trump menekan sekutu NATO untuk memenuhi anggaran pertahanan dan menuntut keuntungan AS. Ini membentuk gaya kepemimpinan yang keras dan konfrontatif dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya memengaruhi sikap AS terhadap NATO yang lebih transaksional dan kurang kooperatif.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis subjek penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data kualitatif yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data mendalam yang dianalisis secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan yang dapat menjelaskan fenomena secara elaborative (Sugiyono, 2013).

1.8.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe kualitatif, jenis eksplanatori dengan studi kasus yang menekankan pada analisis wacana kritis untuk mengkaji penggunaan diksi dan gaya komunikasi Trump, serta latar belakang, karakter dan gaya politik Trump selama 2016-2021 yang dapat memengaruhi kepribadian dan gaya kepemimpinannya.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *desk research* yang memanfaatkan perpustakaan, artikel-jurnal digital, dan website resmi yang dapat diuji kredibilitasnya dan dipertanggung jawabkan unsur akademisnya yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Donald Trump selaku presiden dengan gaya politik yang unik menjadi subjek penelitian. Peneliti secara khusus akan melihat bagaimana faktor idiosinkratik Trump dapat memengaruhi sikap AS kepada aliansi militer, NATO. Subjek ini akan membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji artikel jurnal, laporan, dan berita. Selain itu, data penelitian ini menggunakan data konten teks dan audio-visual, seperti wawancara yang ditranskrip, postingan media sosial, serta meneliti melalui video wawancara dan pidato Trump yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer merupakan data langsung yang diberikan kepada orang yang mengumpulkan data, sedangkan sumber data sekunder ialah data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, sehingga orang mendapatkan data dari sebuah dokumen maupun informasi kedua. Melalui metode kualitatif,

peneliti memanfaatkan penggunaan data sekunder melalui pernyataan dari sebuah pidato maupun wawancara dari aktor, *website* resmi, arsip, atau dokumen resmi yang dinyatakan oleh pemerintah AS ataupun lembaga terkait serta buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang sesuai dengan topik penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka sebelumnya yang relevan dengan penelitian. Bahan ini bisa berupa jurnal, buku, artikel sebelumnya dan informasi dari *website* resmi yang nanti dapat diolah dan diuji kredibilitasnya oleh peneliti sehingga mampu menyempurnakan penelitian ini dan menghasilkan penelitian yang sah. Dokumen dapat berupa teks, visualisasi, maupun karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Penelitian ini akan lebih banyak menggunakan dokumen wawancara dan pidato publik serta skrip pernyataan dari Trump untuk analisis retorikanya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengidentifikasikan data sesuai dengan kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, merangkai ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan dengan tujuan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis diskursus (*discourse analysis*). Fairclough mengasumsikan bahwa Bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, sehingga Ia mengartikan analisis dirkusus sebagai metode untuk memahami makna dan tujuan dari dahasa dengan melihat konteks sosial-budaya, dan politiknya, tidak hanya menelaah teks secara linguistik (Fairclough, 2004). Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan teks pernyataan Trump dari berbagai sumber, seperti pidato, wawancara, dan konferensi pers, serta media sosial. Data kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana bahasa yang digunakan oleh Trump terdapat makna terkait NATO menggunakan indikator kerangka milik Hermann untuk menarik kesimpulan sesuai rumusan masalah.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penulis menggunakan data dan informasi dari sumber kredibel nasional maupun internasional yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian. Penulis memanfaatkan fasilitas Undip, yaitu *website* SIAP yang dapat mengakses jurnal-jurnal gratis yang telah menjadi langganan Undip, buku-buku dari perpustakaan Undip, serta memanfaatkan informasi melalui internet.